

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama ini pandangan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dianggap kurang mampu memberikan pelayanan sebagaimana yang dibutuhkan. Terutama untuk pelayanan kesehatan yang mutunya masih kurang, seperti kurang transparan, tatakelola kurang baik, pendanaan terbatas, sumber daya manusia kurang memadai dan disiplin yang rendah.

Seiring dengan dinamika perkembangan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan melalui reformasi pengelolaan keuangan negara, pemerintah mengeluarkan paket Undang-Undang yang merubah pola pikir dan perilaku di lingkungan pemerintah, yaitu Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan. Paket Undang-Undang tersebut memberikan perubahan terhadap pengelolaan keuangan negara menjadi lebih efisien, profesional, akuntabel dan transparan serta peningkatan mutu. Orientasi pada *outputs* semakin menjadi praktik yang dianut luas oleh pemerintahan modern di berbagai negara. Mewiraswastakan pemerintah (*enterprising the government*) adalah paradigma yang memberi arah yang tepat bagi keuangan sektor publik.

Berdasarkan paket Undang-Undang yang dikeluarkan pemerintah tersebut untuk instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Instansi demikian, dengan sebutan umum sebagai Badan Layanan Umum (BLU), diharapkan menjadi contoh dari penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil (kinerja). Rumah sakit sebagai salah satu instansi yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola ini. Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan kesehatan

masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik yang sangat kompleks.

Sebagai salah satu instansi yang menerapkan manajemen berbasis kinerja dengan menerapkan PPK-BLU, maka pengukuran kinerja rumah sakit sangatlah penting untuk dilakukan. Pengukuran kinerja rumah sakit akan berpengaruh terhadap status PPK-BLU yang diberikan. Hasil pengukuran kinerja akan menyatakan apakah status PPK-BLU itu tetap, diturunkan atau malah dicabut. Selain itu pengukuran kinerja ini akan memberikan masukan kepada pemerintah untuk mengetahui kinerja pelayanan yang diberikan rumah sakit kepada masyarakat sudah semakin baik atau sebaliknya, dan kinerja keuangan dalam keadaan baik atau buruk, serta mengetahui kondisi keuangan rumah sakit apakah masih memerlukan subsidi atau tidak dengan kata lain bisa mandiri. Walaupun demikian pemerintah harus tetap memberikan dukungan kepada rumah sakit dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan.

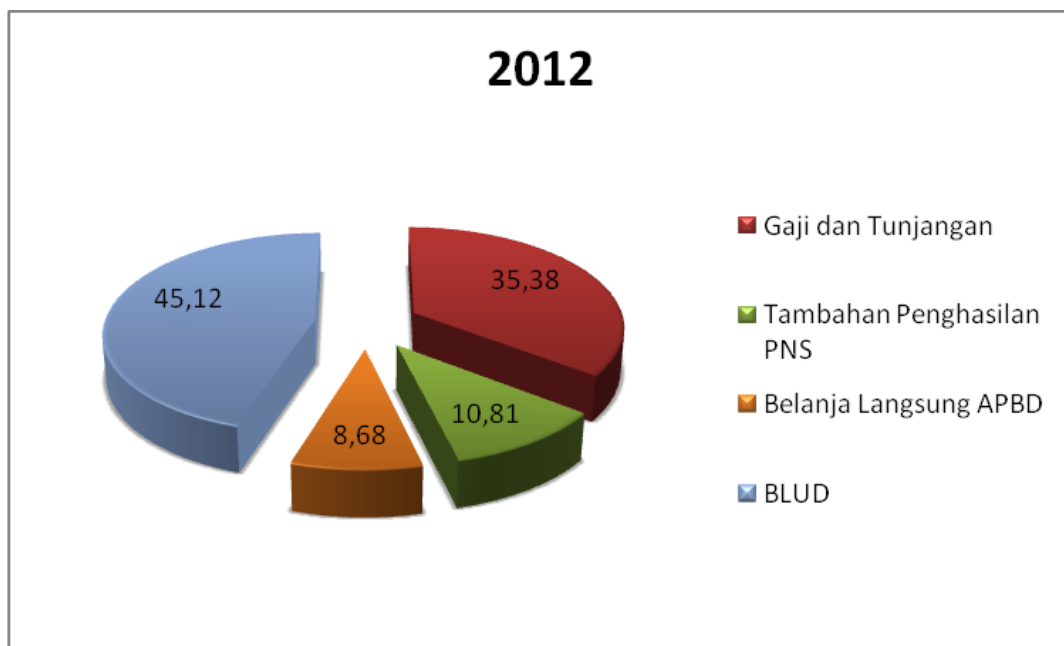
Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto merupakan salah satu unit pelayanan kesehatan masyarakat milik pemerintah daerah Kota Sawahlunto dengan Tipe C berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 481/Menkes/SK/V/1997 tanggal 20 Mei 1997. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto ditetapkan sebagai BLUD berstatus penuh dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 31). RSUD Sawahlunto dalam pengelolaannya menerapkan prinsip ekonomis, efektif dan efisien. Agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat, RSUD Sawahlunto membuat Standar Pelayanan Minimal, Pola Tata Kelola yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sawahlunto. Dalam memberikan pelayanan RSUD Sawahlunto menetapkan suatu pola tarif sebagai imbalan atas jasa dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, namun RSUD Sawahlunto sebagai instansi pemerintah daerah tidak boleh berorientasi pada keuntungan tetapi harus berorientasi kepada pelanggan atau masyarakat. Dalam menetapkan tarif RSUD

Sawahlunto mempertimbangkan (1) Daya beli masyarakat, (2) Jenis Pelayanan yang diberikan, (3) Azas kepatutan, (4) Kompetisi yang sehat dengan melihat tarif RSUD daerah tetangga.

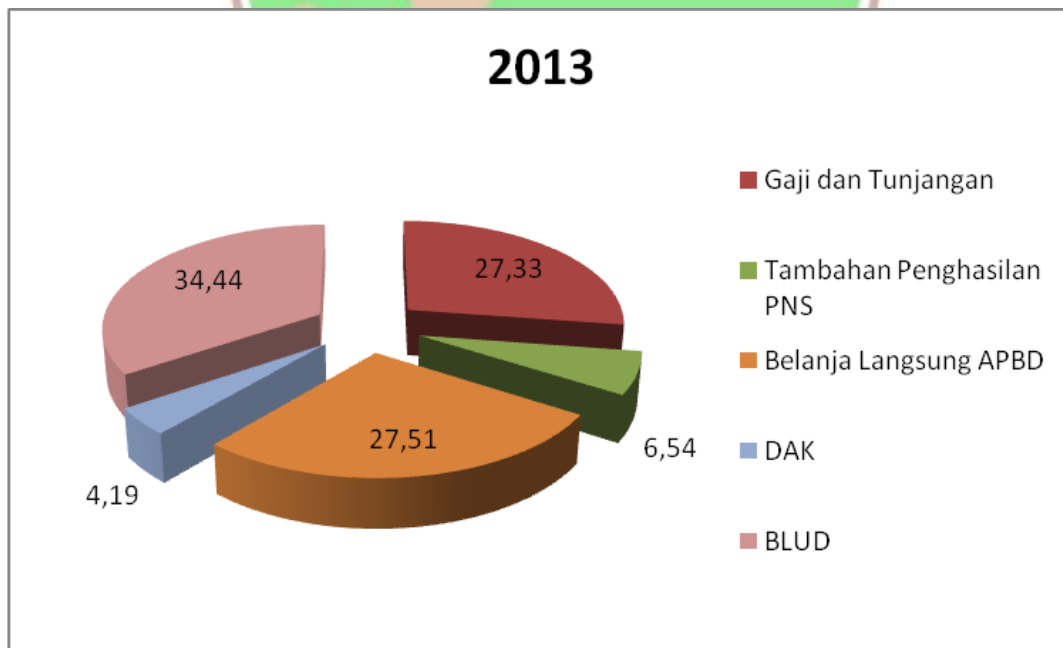
RSUD Sawahlunto dalam menjalankan praktek bisnis yang sehat, tergantung pada kualitas manajemen pengelola Rumah Sakit, yang akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Dengan status BLUD ini, RSUD Sawahlunto lebih leluasa mengatur keuangannya sendiri, dengan keterbatasan dana yang dimiliki untuk memenuhi tuntutan terhadap pelayanan yang bermutu tidak hanya bergantung pada subsidi dari pemerintah daerah. RSUD Sawahlunto harus kreatif menambah pendapatannya dengan melihat potensi-potensi sumber pendapatan. Sumber pendapatan dari pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat yang mempunyai spesifikasi khusus yang tidak dimiliki oleh RSUD tetangga, kemudian sumber pendapatan lain yang dilakukan dengan manajemen keuangan yang baik seperti melakukan investasi jangka pendek, menyewakan lokasi untuk mesin ATM, memaksimalkan lapangan pengelolaan parkir, dan lain-lain yang akan mengurangi ketergantungan terhadap anggaran dari pemerintah daerah.

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap subsidi dari pemerintah daerah maka manajemen RSUD Sawahlunto harus melakukan evaluasi kinerja manajemen dengan melakukan pengukuran capaian indikator kinerja pelayanan dan keuangan. Pengukuran kinerja operasional BLUD ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan BLUD oleh manajemen apakah sudah sesuai dengan prinsip ekonomis, efektif dan efisien, juga akan mengetahui kemandirian anggaran dalam pengelolaan BLUD. Kemandirian BLUD adalah merupakan kemampuan dari BLUD itu untuk membiayai operasionalnya sendiri yang berasal dari pendapatan sendiri tanpa subsidi dari pemerintah daerah. Berikut ini adalah komposisi belanja RSUD Sawahlunto yang menggambarkan tingkat kemandirian sebagai OPD yang menerapkan PPK- BLUD untuk keadaan 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

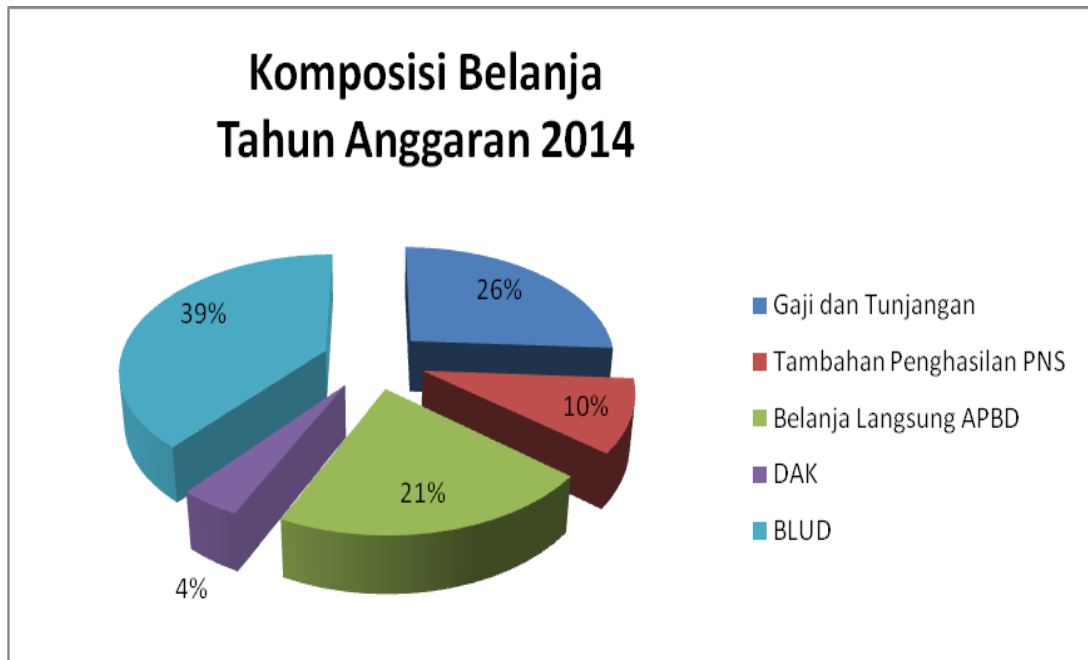
Gambar 1. Diagram Komposisi Belanja RSUD Sawahlunto Tahun 2012



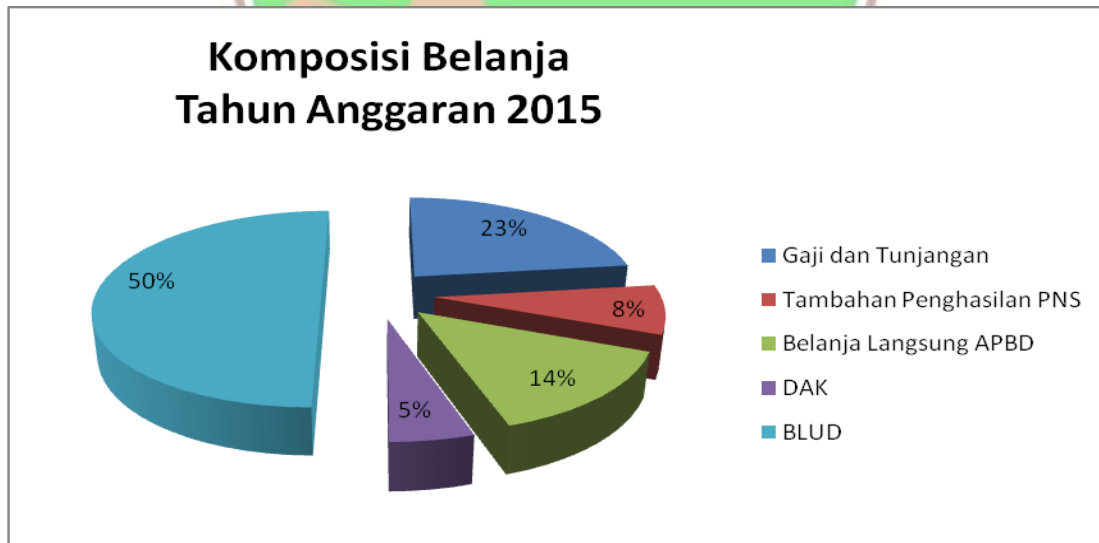
Gambar 2. Diagram Komposisi Belanja RSUD Sawahlunto Tahun 2013



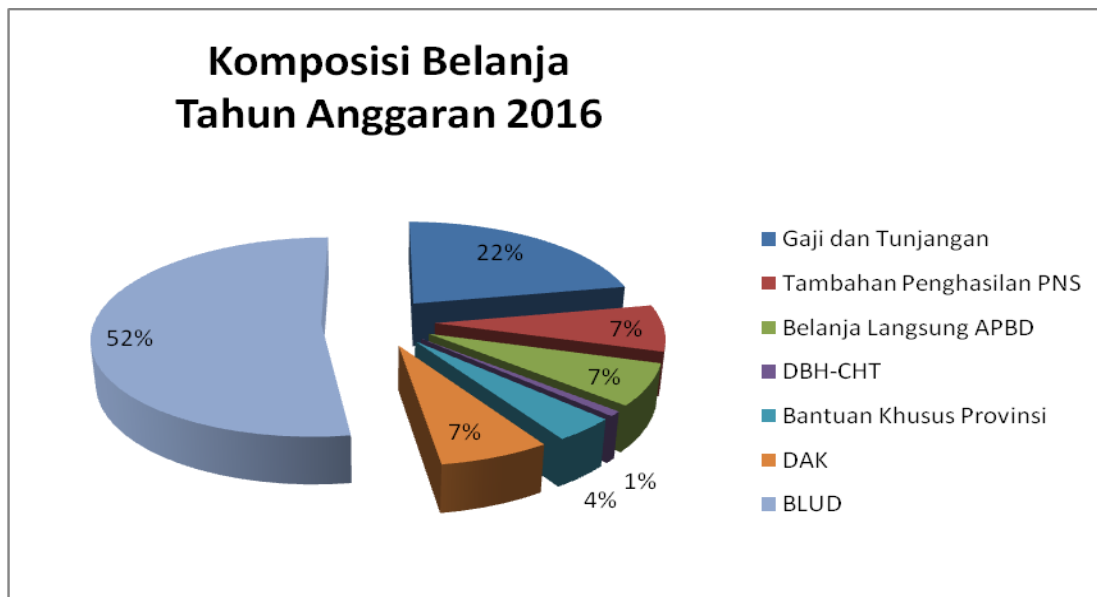
Gambar 3. Diagram Komposisi Belanja RSUD Sawahlunto Tahun 2014



Gambar 4. Diagram Komposisi Belanja RSUD Sawahlunto Tahun 2015



Gambar 5. Diagram Komposisi Belanja RSUD Sawahlunto Tahun 2016



Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap perkembangan kinerja pada RSUD Sawahlunto dalam mencapai tingkat kemandirian.

B. Perumusan Masalah

Sebagai organisasi sektor publik RSUD Sawahlunto menghasilkan output lebih banyak dan berbeda dengan organisasi sektor privat, sehingga pengukuran kinerja saja tidak cukup dan dibutuhkan pengukuran kemandirian RSUD Sawahlunto dalam menyediakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pada penelitian ini rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perkembangan Kinerja RSUD Sawahlunto (5 tahun terakhir) sebagai SKPD yang menerapkan PPK- BLUD.
2. Bagaimana Tingkat Kemandirian yang sudah dicapai RSUD Sawahlunto (5 tahun terakhir) sebagai SKPD yang menerapkan PPK- BLUD.

3. Kendala apa saja yang dihadapi oleh RSUD Sawahlunto dalam implementasi PPK- BLUD.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja RSUD Sawahlunto secara menyeluruh, dengan melihat capaian-capaian indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 34 tahun 2014 sebagai tolak ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan, yang merupakan ukuran minimal yang harus dicapai dalam melakukan pelayanan publik pada RSUD.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi manajemen RSUD Sawahlunto untuk mengetahui gambaran kinerja RSUD Sawahlunto secara menyeluruh.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemilik RSUD Sawahlunto, Dewan Pengawas dan Stakeholder lainnya.
3. Memberikan gambaran informasi yang akuntabel sehingga bisa digunakan dalam menentukan kebijakan strategi RSUD Sawahlunto.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini terbatas pada perkembangan kinerja RSUD Sawahlunto dengan menggunakan pengukuran capaian indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan yang berlaku pada RSUD Sawahlunto sebagai SKPD yang menerapkan PPK- BLUD.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini sistematika penulisan disajikan dalam 5 (lima) bab yang saling berhubungan satu sama lain sebagai berikut :

- Bab I** : Pendahuluan, berisikan uraian latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang

lingkup penelitian dan sistematika penelitian

- Bab II** : Kerangka teori berisikan landasan teori dan penelitian terdahulu
- Bab III** : Metode penelitian berisikan jenis penelitian, variable penelitian dan defenisi operasional, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.
- Bab IV** : Hasil penelitian dan pembahasan berisikan hasil dan pembahasan hasil penelitian.
- Bab V** : Penutup berisikan kesimpulan dari penelitian dan saran untuk penyempurnaan penelitian.

